

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui peningkatan pendapatan, pengetahuan dan keterampilan sesuai dibidang masing-masing. Guna mewujudkan terealisasinya tujuan pembangunan tersebut, maka sangat diperlukan penerapan fungsi manajemen dalam pelaksanaan pembangunan secara terencana, terarah dan tepat sasaran.

Sejak dirumuskannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah banyak mengundang berbagai macam perdebatan dan permasalahan, baik itu dikalangan pemerintah maupun di luar lingkungan pemerintah. Permasalahan yang timbul tersebut dikarenakan banyaknya salah pengertian yang terjadi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyak perubahan besar yang dibawa oleh Undang-Undang ini, tetapi sayangnya tidak disertai oleh kesiapan pejabat pemerintah untuk melaksanakannya sebagai akibat minimnya pengetahuan dan pemahaman serta tidak adanya aturan pelaksanaan oleh pemerintah pusat yang memunculkan berbagai macam kontroversi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Otonomi Daerah itu.

Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah merupakan bagian dari sistem politik yang diharapkan nantinya dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih mampu mengembangkan kreatifitasnya, sehingga dapat menghasilkan perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Mengacu pada perkembangan Otonomi Daerah ini, yang didasarkan pada prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diharapkan nantinya akan dapat menciptakan suatu sistem pelayanan publik dari Pemerintah Daerah yang mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya yang selama ini selalu dibatasi dan dicampuri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pada akhirnya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan dapat mendukung pemerintah sehingga tercipta stabilitas yang mantap dalam lingkungan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah yang paling substansial adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam hal ini tugas itu tentu saja berada ditangan Pemerintah Daerah, dimana dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas, yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dan diharapkan nantinya dapat menyelenggarakan dan melakukan

Pembangunan dalam suatu daerah tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja namun pembangunan dalam suatu wilayah harus mendapat dukungan dari berbagai sektor, baik itu pada sektor pendidikan, perdagangan, pertanian dan sektor-sektor lain yang saling mendukung.

Banyak hal yang harus dipikirkan dan dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan dalam sistem pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan yang harus dicapai dan menjadi prioritas dalam membuat dan melaksanakan program apapun. Dan dalam hal ini tentu saja tidak ada unsur hanya menguntungkan satu golongan saja akan tetapi diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat dalam pembangunan nasional terutama pada sektor pertanian dimana di Indonesia masyarakat dominan memiliki profesi sebagai petani.

Sehubungan dengan obsesi Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi sebagai Lumbung Pangan dan Energi, maka hal ini juga berdampak pada perkembangan yang ada di Kabupaten Musi Rawas yang mayoritas penduduknya bergelut di bidang pertanian. Selain itu visi dan misi dari Kabupaten Musi Rawas adalah menitik beratkan pada pengembangan dibidang pertanian, hal ini memberikan kesan bahwa tugas Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas semakin berat dan perannyapun semakin besar.

Dari dahulu Kabupaten Musi Rawas terkenal dengan pertaniannya dimana hampir dari seluruh lahan pertanian di Kabupaten Musi Rawas di tumbuhi oleh ladang dan kebun para petani. Predikat Kabupaten Musi Rawas yang merupakan lumbung pangan ke 2 setelah Kabupaten Musi

Banyuasin bagi Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak asing lagi terdengar oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas, sebab di Kabupaten Musi Rawas terutama di Kecamatan Tugu Mulyo masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani yang menggarap lahan persawahan milik pemerintah.

Selain itu bidang pertanian yang digeluti oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas bukan saja sebagai penggarap sawah namun perkebunan karet dan sawit juga menjadi prioritas bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Musi Rawas menjadi lumbung pangan dan energi, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2006-2007 perluasan lahan pertanian di Kabupaten Musi Rawas dibuka secara besar-besaran, selain itu eksploitasi terhadap sumber daya alam, sebagai sumber energi juga sangat terlihat perkembangannya, adapun maksud dari perluasan dari lahan pertanian yang ada di Kabupaten Musi Rawas tidak lain untuk pencapaian target dari visi dan misi Kabupaten Musi Rawas dimana pada tahun 2006 produksi padi mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 di Bandingkan Tahun 2006

No	Uraian	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Produksi Padi	: 236.886 Ton GKG	: 232.015 Ton GKG
2.	Tersedia Gabah	: 219.120 Ton	: 214.614 Ton
3.	Ketersediaan Beras	: 138.484 Ton	: 135.636 ton
4.	Jumlah Penduduk	: 478.189 Jiwa	: 484.281 jiwa
5.	Konsumsi Penduduk	: 115 kg/kapita/tahun	: 115 kg/kapita/tahun
6.	Kebutuhan Beras	: 54.992 Ton	: 55.692 ton
7.	Kekurangan / Kelebihan	: + 83.492 Ton	: + 80.036 ton

Sumber: Sekeloa, Kertawati, D., et al. (2007). *Statistik Kabupaten Musi Rawas 2006*. Palembang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 pencapaian produksi padi sebesar 232.015 ton GKG, di bandingkan tahun 2005 menurun 4.871 ton (2,05 %) hal ini disebabkan realisasi luas tanam tahun 2006 tidak tercapai karena adanya musim kemarau yang cukup panjang dan adanya pengeringan dalam perbaikan saluran irigasi, namun masih mengalami surplus beras sebesar 80.036 ton. Untuk meningkatkan kembali produksi pangan maka pemerintah khususnya Dinas Pertanian dituntut untuk lebih memfokuskan perannya dalam meningkatkan hasil produksi pangan sehingga visi dan misi baik dari Dinas Pertanian dan Kabupaten Musi Rawas dapat tercapai dengan baik.

Kekuatan ekonomi Kabupaten Musi Rawas disektor pertanian sangat ditunjang oleh kondisi tanah yang subur. Dataran rendah yang luas menghampar dialiri sungai-sungai seperti sungai Lakitan, Rupit, Kelingi yang bermuara di dua sungai besar, yaitu Sungai Musi dan Sungai Rawas. Tanahnya sangat cocok untuk pertanian. Bahkan sejak 1981, Kabupaten agraris ini sukses berswasembada beras dan menjadi lumbung beras di Sumatera Selatan. Sampai sekarang basis pertanian adalah Kecamatan Tugu Mulyo yang merupakan konsentrasi pemukiman transmigrasi pertama dan terbesar¹.

Dengan penjelasan diatas terlihat sangat jelas bagaimana pentingnya peran dari Dinas Pertanian dalam meningkatkan produksi hasil petanian yang di dukung oleh keadaan geografis yang cocok dengan pertanian dan

juga pertambangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun keadaan geografis di Kabupaten Musi Rawas telah mendukung, tetapi dari segi sumber daya manusia (tingkat Pendidikan) masyarakat petani terutama di pedesaan masih sangat rendah, padahal di Kabupaten Musi Rawas bidang pertanian masih sangat berpengaruh dan merupakan prioritas utama terhadap kehidupan sebagian besar masyarakat. Dengan kondisi ini maka sangat perlu didukung dengan upaya program dari Dinas Pertanian yang mengarah pada pemberdayaan para petani, seperti yang telah dilakukan selama ini melalui penyuluhan-penyuluhan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan pembentukan kelompok tani agar mereka dapat mandiri, kreatif, dan dinamis, sehingga mereka dapat mampu mengelola usaha taninya sesuai dengan kondisi lokal, kebutuhan nyata dan saling berinteraksi satu sama lain secara sehat. Melalui jalur persatuan kelompok tani, perlu dibentuk lembaga yang mampu mewakili kelompok tani dalam membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Dengan menurunnya produksi hasil pertanian pada tahun 2006 dan juga dalam pencapaian dari visi dan misi dari Kabupaten Musi Rawas yang menitik beratkan pada bidang pertanian maka peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas sangat dibutuhkan yang di harapkan meningkatkan kembali produksi pertanian di Kabupaten Musi Rawas, namun pada kenyataannya pada tahun 2006 produksi hasil pertanian di Kabupaten Musi Rawas menurun. Dengan inilah maka peran dari Dinas Pertanian Kabupaten

Dan diharapkan dengan penelitian ini diupayakan dapat menjawab pertanyaan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada penjelasan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu :

“Bagaimana Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan Tahun 2005-2007?”

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui peran dan program dari dinas pertanian dalam meningkatkan produksi hasil pertanian.
2. Mengetahui bagaimana peningkatan produksi hasil pertanian pada tahun 2005-2007 di Kadupaten Musi Rawas.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Secara Teoritis, Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan dan menambah kajian dalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang bagaimana peran dari dinas yang ada di daerah. Dalam hal ini mengetahui bagaimana peran dari Dinas Pertanian dalam meningkatkan produksi hasil pertanian.

a. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam mengetahui bagaimana peran dari dinas pertanian.

b. Dinas Pertanian

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparaturnya Pemerintah Pusat dan Khususnya Pemerintahan Daerah yaitu bagi Dinas Pertanian dalam meningkatkan produksi hasil pertanian terutama pada tanaman pangan dalam rangka perwujudan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat.

c. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ide atau pemikiran mengenai peningkatan produksi dari hasil pertanian bagi petani .

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan kumpulan dari teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian atau upaya penulis dalam melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan pemahaman teoritis yang lebih, yang berhubungan dengan penelitian. selain itu melalui teori maka akan dapat dijelaskan secara sistematis mengenai hubungan antara konsep/variable

Koentjaraningrat berpendapat bahwa :

"Teori merupakan pernyataan mengenai suatu akibat atau mengenai adanya hubungan yang positif antara gejala-gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat".²

Sedangkan menurut Munandar Soelaiman, teori adalah :

"Prinsip-prinsip dasar yang berwujud dalam bentuk aturan atau rumusan yang berlaku umum, menjelaskan hubungan antara dua gejala atau lebih, alat untuk menjelaskan atau pemahaman, dapat diverifikasi, berguna dalam meramalkan sesuatu kejadian".³

Menurut Sofian Effendi, teori adalah *"serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi, proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep".⁴*

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan diatas, maka penyusun akan menyampaikan beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Peranan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa : Peranan adalah merupakan aspek dinamika dari status (keduduksn), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan satu peran.⁵

² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1993. Hal. 9

³ Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, Eresco, Bandung, 1985. Hal. 10

⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989 Hal 37

Kemudian dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian dari peran dapat di jelaskan sebagai berikut : “Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat”⁶.

Menurut pendapat dari Astrid S. Susanto, Peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu ⁷:

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam hal ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai masyarakat.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

Kemudian Koentjaraningrat mengatakan bahwa : “peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”⁸.

Status yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas dari peranan-peranan yang dilakukan orang tersebut kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang terhadap lingkungan sosialnya

⁶ Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991. Hal 1132.

⁷ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cita, 1983. Hal. 95.

⁸ Koentjaraningrat, *Peranan dan Status*, Bina Cita, 1983. Hal. 95.

sangat berpengaruh pada status seseorang. Demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi pula.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dijalankan atau yang dilakukan sesuai dengan kedudukan dan status yang dimiliki atau dipunyai. Apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya maka ia telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dengan sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Peran ini oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas dirumuskan kedalam suatu program, yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah mancapai tujuan yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian. Program-program peningkatan produksi pertanian yang dilakukan adalah : Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para petani, penyediaan sarana produksi pertanian, pengembangan bibit unggul pertanian, sertifikasi bibit unggul, dll.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang ada di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintahan daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah menyatakan bahwa : "Pembagian Daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam suatu pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa"⁹

Menurut Mashuri Maschab, Pemerintah Daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹¹

⁹ Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰ Mashuri Maschab, *Pemerintahan di Daerah*, Fisis UGM, Yogyakarta, 1982. Hal.32

¹¹ Undang-Undang No 32 Tahun 2004

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dimana untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar berjalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

3. Dinas Pertanian

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah kabupaten adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah. Sesuai dengan pembagian

daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom, maka mempunyai kewenangan dan keluesan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam undang-undang tentang otonomi daerah tercantum wewenang dan kebebasan bagi daerah yaitu daerah diberikan wewenang dan kebebasan dalam membentuk instansi-instansi, lembaga-lembaga dan lain-lain yang berhubungan dengan pembangunan dan kelancaran administrasi daerah. Dengan wewenang dan kebebasan serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor : 9 tahun 2002. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas. Dengan maksud untuk mempermudah jalannya pemerintahan dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, serta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan wewenang dalam bidang pertanian. Pada pasal 3 tugas pokok Dinas Pertanian adalah membantu Bupati dalam bidang pertanian, tanaman pangan. Dalam

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksudkan Dinas Pertanian mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam program kerja dibidang pertanian.
- b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro dibidang pertanian.
- c. Pembinaan terhadap cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pertanian.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian.
- e. Pengelolaan urusan ketata-usahaan dinas.

Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan fungsi dinas tersebut dilakukan melalui sub-sub dinas. Adapun peranan dari Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas yang akan penulis ambil adalah peranan Dinas Pertanian melalui Sub Dinas pada Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dimana dalam sub-sub dinas ini akan terlihat bagaimana peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas dalam Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian.

4. Produksi Hasil Pertanian.

Produksi hasil pertanian adalah usaha untuk meningkatkan hasil dari pertanian. Usaha-usaha yang dilakukan adalah berbagai kegiatan yang telah ditetapkan. Produksi ini bertujuan untuk memenuhi

kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan dapat tercapai apabila kebutuhan dari masyarakat dapat terpenuhi.

a. Produksi

Secara umum produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Namun menurut ilmu ekonomi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau juga kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Selain itu teori lain juga mengatakan produksi adalah sebagai usaha untuk menciptakan atau menambah feadah ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam usaha mencapai kemakmuran. Di dalam suatu proses produksi ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- 1) Komposisi input yang bagaimana yang harus digunakan? bagaimana proses produksi berlangsung agar tingkat produksi maksimal?
- 2) Komposisi input yang bagaimana yang harus digunakan? bagaimana proses produksi dilaksanakan agar biaya produksi serendah mungkin?

Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa faktor produksi antara lain yaitu, Sumber daya alam, sumber daya manusia, Tenaga kerja manusia, Modal dan kewirausahaan. Sumber daya alam

dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumberdaya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi, seperti :

- 1) Tanah, tumbuhan, hewan.
- 2) Udara, sinar matahari, hujan.
- 3) Bahan tambang, dan lain sebagainya.

Tenaga kerja manusia (sumber daya manusia) adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Sedangkan sumber daya modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Di dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan dan bahan-bahan. Yang terakhir adalah faktor sumber daya pengusaha ini disebut juga kewirausahaan. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien.

Penjelasan di atas menyatakan penjelasan produksi yang dilihat dari segi umum dan ekonomi, namun dari segi pertanian produksi dilihat dari bagaimana hasil yang didapat dari pertanian. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan pertanian, dan dalam

... ..

b. Pembangunan Sektor Pertanian

Sektor pertanian dalam pembangunan dibidang ekonomi khususnya komoditi tanaman pangan mempunyai peran penyediaan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta menunjang ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan dan juga Nasional sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas karena sektor pertanian merupakan sektor yang dominan digeluti oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Pembangunan pertanian merupakan bagian yang penting dalam pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas, hal ini karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Musi Rawas memiliki mata pencaharian sebagai petani, diantaranya mencakup petani kebun, sawah dan petani hutan (ladang). Pembangunan pada sektor pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan kerja di bidang pertanian, serta memelihara dan melestarikan sumber daya lahan pertanian dan lingkungan. Tujuan ini dapat tercapai apabila masyarakat diberdayakan dan kemampuannya ditingkatkan, serta dimaksudkan dapat meningkatkan produksi hasil pertanian,

Musi Rawas merupakan kabupaten yang sumber pendapatan utama dari masyarakatnya adalah di bidang pertanian, sehingga dapat berperan sebagai sumber pertumbuhan dan perekonomian daerah. Dan dengan peningkatan produksi hasil pertanian diharapkan pencapaian visi dan misi dari Kabupaten Musi Rawas yang menitik beratkan pada perkembangan sektor pertanian dapat tercapai, namun semua ini juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan.

Pembangunan sektor pertanian dianggap penting dari keseluruhan pembangunan pada sektor lain karena beberapa alasan. Alasan-alasan ini lah yang menjadi dasar dari pentingnya pembangunan di sektor pertanian yaitu :

- 1) Potensi sumber daya yang besar.
- 2) Pengaruh sektor pertanian terhadap pendapatan Nasional cukup besar.
- 3) Besarnya ekspor dari bidang pertanian.
- 4) Besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
- 5) Peranan sektor pertanian dalam penyediaan pangan sangat besar baik itu untuk Pemerintah Daerah dan juga Nasional.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa :

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, dan jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula faktanya mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut¹².

Konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Pertanian

Peranan Dinas Pertanian adalah semua yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sesuai dengan tujuan dan program-program yang dibuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian.

2. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian adalah unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana kewenangan daerah dibidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Produksi Hasil Pertanian

Produksi yaitu usaha untuk menciptakan atau menambah faedah ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi hasil pertanian yaitu usaha untuk meningkatkan hasil dari pertanian.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel, dengan menggunakan landasan¹³. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini menggunakan indikatot-indikator yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta program-program dari Dinas Pertanian. Dari beberapa program yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas peneliti hanya memfokuskan pada program peningkatan produksi pertanian yang dapat mendukung dalam penulisan yaitu : Program Peningkatan Produksi Pertanian antara lain :

1. Penyediaan sarana produksi pertanian
 2. Pengembangan bibit unggul pertanian
 3. Sertifikasi bibit unggul pertanian
 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-

Dengan demikian akan ada batasan dari penelitian yang penulis lakukan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana peran dari Dinas Pertanian dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Musi Rawas .

H. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian dengan kata lain setiap peneliti harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Winarno Surachmad berpendapat bahwa :

“Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yaitu dari kerja untuk memahami objek-objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Study dimana dalam penelitian ini akan dilukiskan atau digambarkan mengenai keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini di katagorikan sebagai penelitian kualitatif, karena hanya mencari fakta dan selanjutnya menjelaskan secara deskriptif tentang fakta yang bersangkutan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya.

Adapun cara kerja dan alur pikiran yang akan dilalui oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian terhadap dokumen terkait yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara mempelajari segala dokumen yang ada hubungannya dengan masalah/objek yang akan diteliti.
- b. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara mengamati atau meneliti suatu objek secara seksama.

2. Lokasi Penelitian

Daerah atau lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas. Adapun alasan-alasan mengapa memilih Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas sebagai lokasi penelitian karena :

- a. Dinas Pertanian merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam pencapaian visi dan misi dari Kabupaten Musi Rawas, dimana visi dari Kabupaten Musi Rawas adalah "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah Berbasis Agraris".
- b. Kabupaten Musi Rawas Merupakan Kabupaten yang produksi pangannya terbesar di Provinsi Sumatera Selatan selain Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Produksi hasil pertanian di Kabupaten Musi Rawas termasuk

Dengan demikian maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan produksi hasil pertanian dan juga dalam menjalankan program-program kepada masyarakat petani.

3. Unit Analisis

Berdasarkan pada permasalahan yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah pada Dinas Pertanian di Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan-kebijakan dan program-programnya dalam menyangkut pengembangan sektor pertanian dan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Musi Rawas.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang menjelaskan tentang obyek dari penelitian dan yang mendukung dari permasalahan, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat di bahas sehingga menghasilkan suatu konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun jenis data yang di perlukan yaitu :

a. Data Primer

Data primer berisikan tentang data yang didapat dari wawancara dan observasi . Adapun data wawancara adalah data yang didapat dari responden dimana data ini merupakan bagian utama dari penelitian ini. Kemudian daftar pertanyaan (kuesioner)

data tentang topik penelitian. kemudian data primer yang lain adalah didapat dari observasi yaitu tinjauan langsung ke obyek yang akan diteliti. Dimana data ini menjadi data awal tentang obyek yang akan diteliti. Dengan demikian kedua data tersebut sangat penting dan saling melengkapi. Namun dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kuesioner, melainkan data langsung dari wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara langsung, namun data yang didapat dari dokumen-dokumen yang mencatat keadaan tempat penelitian ataupun yang terkait dengan penelitian. Data dokumentasi dapat berupa informasi mengenai monografi daerah penelitian. Kegunaan dari data ini adalah memberikan gambaran dari latar belakang dan obyek penelitian. Gambaran latar belakang atau juga tempat penelitian mempunyai fungsi sebagai rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut. Selain itu informasi tentang monografi daerah penelitian juga memberikan indikasi tentang karakteristik sosial, ekonomi, pendidikan dan juga lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara Atau Interview

Interview adalah teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung pada responden, guna mendapatkan informasi yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Dari Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian Di Kabupaten Musi Rawas”, peneliti mengadakan wawancara langsung yang dilakukan kepada pegawai-pegawai yang ada di kantor Dinas Pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura) Kabupaten Musi Rawas dan juga kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun pegawai yang akan di wawancarai adalah sebagai berikut :

1. Bp. ABD. Muis b.m. BAKUB, SP, MM selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas.
2. Bp. Mulyono selaku Seksi dan Wakil Kepala Bidang Program di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas.
3. Bp. Tatang Suparno, SP selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas.
4. Bp. Ir. Eka Ardi Aguscik selaku seksi Produksi Padi dan

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

5. Bp. Sarana Gani Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
6. Bp. Temon Mahmudi selaku KTNA dan Ketua Kelompok Petani di Kecamatan Karang Jaya.

Adapun tujuan menggunakan teknik pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai data atau fenomena yang ada ditempat penelitian.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari obyek penelitian. Data dokumentasi dapat berasal dari koran, majalah, kajian-kajian ilmiah, yang dalam hal ini merupakan kajian-kajian masalah pertanian, kemudian dari makalah-makalah seminar tentang pertanian, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa arsip-arsip, catatan monografi, dan catatan-catatan lain yang diperlukan dalam penelitian ini, yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas dan juga pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian telah terkumpul maka data diolah atau diinterpretasikan agar mudah

kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan¹⁵.

Menurut Natsir, analisa data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah karena dengan dianalisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya peneliti akan menganalisa fenomena atau objek yang diteliti dan merelasikan data atas dasar teori yang ada secara tuntut dan memakai makna yang bersifat menyeluruh.

Selain itu penulis mencoba melakukan analisis melalui cara :

- a. Mereduksi data, yaitu data dan informasi yang diterima dari hasil wawancara diharapkan dipilih hal-hal pokok yang berhubungan dengan objek penelitian dan difokuskan pada hal-hal yang penting guna mempertajam pusat perhatian terhadap permasalahan.
- b. Mengelompokkan data, data-data yang ada diklasifikasikan oleh penulis menurut tujuan yang hendak menjadi bagian pembahasan.
- c. Dari data yang telah diolah menjadi informasi, peneliti kemudian menginterpretasikan dan menyusunnya kedalam bentuk kesimpulan.

¹⁵ Soekanto. S. "Teori Perubahan Sosial" Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1999. Hal 22